

MODUL KULIAH ONLINE 12

EBM 301 – MANAJEMEN KOPERASI DAN UKM

PERKEMBANGAN KOPERASI DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Koperasi secara sistem telah diperkenalkan di Indonesia, atau Hindia Belanda pada masa itu, sejak pertengahan abad ke-19. Pada perkembangannya, filosofi koperasi kemudian diadopsi sebagai

sistem perekonomian negara Indonesia setelah merdeka, seperti bagaimana dijelaskan dalam dasar negara (UUD 45): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha bersama dan azas kekeluargaan merupakan ciri khas koperasi yang diharapkan mampu membangun Indonesia yang baru saja lahir agar mampu mandiri secara ekonomi. Gerakan koperasi secara resmi dideklarasikan pada 14 Juli 1947.

Setelah hampir 67 tahun koperasi eksis dan dipraktikan di Indonesia, bahkan dijadikan sebagai filosofi dasar perekonomian negara, belum ada satupun koperasi Indonesia yang dapat masuk ke jajaran koperasi elit kelas dunia atau bahkan dapat dikategorikan sebagai koperasi sehat dengan skala ekonomis besar. Ironis memang, mengingat sistem ekonomi koperasi didaulat sebagai suatu sistem ekonomi yang paling cocok dengan sistem perekonomian nasional Indonesia.

Perlu disadari bahwa koperasi sebagai usaha kelompok yang bukan berasal atau khas Indonesia, merupakan suatu cara yang berawal diperkenalkan di Inggris pada masa Revolusi Industri di akhir abad ke-18 yang diprakarsai oleh seorang industrialis-sosialis bernama Robert Owen. Sejak awal kelahirannya, koperasi tumbuh sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, mereka tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar.

Koperasi merupakan cara alternatif yang timbul sebagai perlawanan masyarakat kelas menengah ke bawah terhadap penguasaan faktor-faktor ekonomi oleh para masyarakat kelas atas pemodal kuat sebagai akibat dari terjadinya revolusi dalam cara mengelola perekonomian di Inggris pada saat itu sehingga modal cenderung berkumpul pada entitas-entitas usaha tertentu. Dalam perkembangannya, koperasi di Inggris dan negara-negara maju mampu meraih posisi tawar dengan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional.

Lain halnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, koperasi dihadirkan dengan tujuan membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Koperasi diadopsi oleh negara, bahkan dalam kasus tertentu diimplementasikan ke dalam pokok-pokok dasar negara seperti halnya Indonesia mewujudkannya

dalam Pasal 33 UUD 45. Sehingga campur tangan pemerintah sangat kuat dalam perkoperasian di negara-negara berkembang, baik itu dalam hal regulasi maupun kegiatan operasional sehari-hari.

Situasi ekonomi ekstrim yang penuh dengan ketidakadilan pasar mendorong masyarakat negara-negara maju untuk berkoperasi yang kemudian berdampak kepada kinerja koperasi mereka pada saat sekarang ini. Mayoritas koperasi terbaik di dunia berasal dari negara-negara maju yang notabene merupakan penganut sistem kapitalis. Bahkan banyak koperasi dari negara-negara maju mampu mengurus diri dengan baik dan sehat lalu kemudian menjadi perusahaan-perusahaan raksasa yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan kapitalis. Bahkan akuisisi perusahaan besar oleh koperasi bukan merupakan suatu yang lazim di negara-negara maju.

Koperasi di negara-negara maju menguasai berbagai sektor perekonomian. Koperasi konsumsi merupakan pionir dari penciptaan rantai perdagangan moderen di berbagai negara Eropa khususnya negara-negara Skandinavia. Di negara-negara seperti Prancis, Austria, Finlandia dan Siprus; koperasi menguasai sektor perbankan. Menurut data *International Co-operative Alliance*, pangsa pasar dari bank-bank koperasi mencapai sekitar sepertiga dari total bank yang ada. Sebagai contoh, dua bank terbesar di Eropa, yaitu: *Credit Agricole* di Prancis dan *RABO-Bank* di Belanda dimiliki oleh koperasi.

Sementara itu, Amerika Serikat yang bersinonim dengan kata kapitalis memiliki 25% dari jumlah penduduknya sebagai anggota koperasi dengan lebih dari 30 koperasi memiliki penghasilan tahunan lebih dari 1 miliar USD. Salah satu koperasi yang sangat besar adalah koperasi simpan pinjam (credit union), memiliki anggota mencapai sekitar 80 juta orang dengan rata-rata jumlah simpanannya 3.000 dollar. Di Jepang, juga merupakan negara yang dicap menerapkan sistem pasar bebas dengan ekstrim, 1 dari setiap 3 keluarga adalah anggota koperasi. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai bank rakyat karena koperasi di Jepang beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan. Bahkan salah satu bank besar di Jepang adalah koperasi, yakni *Nurinchukin bank*.

Sementara negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, tidak jarang menggunakan sistem koperasi yang memang lekat dengan azas kebersamaan sebagai media propaganda. Koperasi dijadikan sebagai alat untuk menggiring opini publik bahwa negara menjalankan sistem koperasi anti terhadap sistem kapitalis yang akan merugikan negara, serta tentunya rakyat. Hal tersebut tidak salah, namun dikotomi koperasi dengan kapitalis seakan bagai minyak dan air sangatlah tidak tepat. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dunia sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, perkembangan koperasi-koperasi di negara-negara maju tidak bertentangan dengan ekonomi kapitalis. Bahkan sebaliknya, koperasi di negara-negara maju tidak hanya mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar non-koperasi, tetapi mereka juga menyumbang terhadap kemajuan ekonomi dari negara-negara kapitalis tersebut.

Yang membedakan koperasi di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang yaitu kinerja dalam pengelolaan koperasi. Koperasi di negara-negara maju dikelola secara profesional sehingga mampu bersaing atau bahkan melebihi perusahaan-perusahaan konvensional dikarenakan koperasi memiliki keunggulan lebih, yaitu kesetiaan anggota dan azas kebersamaan. Koperasi di negara-negara berkembang cenderung dipaksakan untuk hadir, karena merupakan dasar perekonomian negara, bukan sebagai usaha murni dan niat sungguh-sungguh dari masyarakat. Efeknya, koperasi di negara-negara berkembang cenderung banyak yang tidak dikelola secara profesional bahkan tidak jarang menjadi alat keuntungan sebagian kelompok saja. Pengelolaan yang tidak profesional, tidak transparan, serta terlalu banyak campur tangan pemerintah menjadikan banyak koperasi asal jadi; hidup segan mati tak mau. Ini juga banyak kita jumpai di Indonesia.

Dalam suatu penelitian di negara-negara Sub-Sahara Afrika, menyimpulkan bahwa buruknya kinerja koperasi di Sub-Sahara Afrika, atau di banyak negara berkembang pada umumnya, disebabkan oleh sejumlah faktor yang bisa dibedakan antara faktor-faktor eksternal diluar kontrol koperasi dan faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal terutama adalah keterbatasan partisipasi anggota, masalah-masalah struktural dan kontrol, dan kesalahan manajemen. Sedangkan faktor-faktor eksternal terutama adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar yang sering didorong oleh donor, kesulitan lingkungan-lingkungan ekonomi dan politik, dan harapan-harapan yang

tidak realistis atas peran dari koperasi. Menurut hasil penelitian, problem paling signifikan adalah cara bagaimana koperasi dipromosikan oleh pemerintah. Promosi yang sifatnya dari 'top-down' telah menghalangi anggota untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan koperasi. Bentuk-bentuk organisasi dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan diatur oleh pihak luar dan koperasi telah gagal untuk berkembang menjadi unit-unit yang mandiri dan sepenuhnya berdasarkan anggota.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita mencoba merenung dan berpikir, apakah benar koperasi merupakan produk untuk menjegal sistem kapitalis dan tidak akan hidup di dalam sistem tersebut? Mengingat tidak jarang koperasi disurakan sebagai sesuatu yang anti kapitalisme, anti asing. Mengutip kicau @wilsonsitorus di twitter: Asing itu demarkasi imajiner, yang muncul sebab minder.

Problematika dan Tantangan Koperasi

Seperti diketahui dengan keberadaan orde reformasi yang dinyatakan sebagai anti tesis Orde Baru maka dengan serta merta sejumlah instrumen politik maupun ekonomi yang merupakan bagian penting era kepemimpinan rezim Soeharto itu menjadi sesuatu yang saat ini mesti dikerdilkan, fakta inilah yang saat ini suka atau tidak suka mendera pengembangan koperasi sebagai instrumen soko guru ketiga perekonomian yang digagas para founding father yang kemudian begitu digelorakan perkembangannya saat era Orde Baru mesti menerima nasib naas saat ini.

Publik pasti paham bagaimana era Orde Baru memanjakan institusi Koperasi, sehingga semua jenis koperasi dari berbagai jenjang hingga ke tingkat desa difasilitasi. Masyarakat tentu tidak akan pernah lupa dengan istilah Koperasi Unit Desa yang tumbuh subur di hampir semua desa di Indonesia pada dasawarsa kedua rezim Soeharto.

Pengamat ekonomi yang juga Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Mohammad Nafik Hadi Riandono menyatakan bahwa jaman kejayaan koperasi saat ini sudah mulai berakhir, hal ini seriiing dengan tenggelamnya rezim Orde Baru yang merupakan pendukung penuh gagasan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui institusi koperasi.

“Suka atau tidak suka, pembinaan koperasi secara nasional tidak segegap gempita seperti di era Orde Baru, meski masih mendapat porsi pembinaan namun keperpihakan pemerintah secara nasional terhadap koperasi perlahan mulai menyusut,” kata Nafik yang juga Wakil Ketua Kadin Jatim itu kepada Kanalsatu.com Sabtu (24/9/16).

Selain problematika keperpihakan politik nasional, sejumlah pihak memberikan catatan terkait problem yang membelit koperasi yaitu pertama **Keterbatasan dibidang permodalan**. Bagi koperasi yang baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang. Kedua **Daya saing lemah**. Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya, koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan mereka. Ketiga **Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota**. Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, seperti tidak menyetorkan Iuran wajib terhadap koperasi.

Keempat **Kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi**. Sumber Daya Manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya dan masalah lainnya.

Kelima terkait masalah **masih minim jejaring dan pasar** terhadap produk yang diproduksi oleh koperasi, ini juga terkait kualitas dan kapasitas produksi dari produk koperasi.

Dari kelima problem tersebut setidaknya ada 3 poin yang saat ini mesti menjadi sorotan dan tidak bisa ditawar untuk pengurus koperasi bila menginginkan intitusinya bisa berkembang, tanpa mengesampingkan 2 poin lainnya. Ketiga poin tersebut yang saat ini dinilai krusial adalah daya saing, manajerial yang profesional serta jejaring dan pasar produk.

“Ketiga aspek yaitu daya saing, manajerial yang profesional serta jejaring dan pasar produk saat ini menjadi keyword bagi semua pihak yang ingin memajukan atau mengelola koperasi menjadi lebih baik.

Pada saat ini dengan globalisasi dan runtuhnya perekonomian sosialis di Eropa Timur serta terbukanya Afrika, maka gerakan koperasi di dunia telah mencapai suatu status yang menyatu di seluruh dunia. Dimasa lalu jangkauan pertukaran pengalaman gerakan koperasi dibatasi oleh blok politik/ekonomi, sehingga orang berbicara koperasi sering dengan pengertian berbeda. Meskipun hingga tahun 1960-an konsep gerakan koperasi belum mendapat kesepakatan secara internasional,

namun dengan lahirnya Revolusi ILO-127 tahun 1966 maka dasar pengembangan koperasi mulai digunakan dengan tekanan pada saat itu adalah memanfaatkan model koperasi sebagai wahana promosi kesejahteraan masyarakat, terutama kaum pekerja yang ketika itu kental dengan sebutan kaum buruh. Sehingga syarat yang ditekankan bagi keanggotaan koperasi adalah “Kemampuan untuk memanfaatkan jasa koperasi”. Dalam hal ini resolusi tersebut telah mendorong tumbuhnya program-program pengembangan koperasi yang lebih sistematis dan digalang secara internasional.

Pada akhir 1980-an koperasi dunia mulai gelisah dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi dimana-mana, sehingga berbagai langkah pengkajian ulang kekuatan koperasi dilakukan. Hingga tahun 1992 Kongres ICA di Tokyo melalui pidato Presiden ICA (Lars Marcus) masih melihat perlunya koperasi melihat pengalaman swasta, bahkan laporan Sven Akheberg menganjurkan agar koperasi mengikuti layaknya “private enterprise”. Namun dalam perdebatan Tokyo melahirkan kesepakatan untuk mendalami kembali semangat koperasi dan mencari kekuatan gerakan koperasi serta kembali kepada sebab di dirikannya koperasi. Sepuluh tahun kemudian Presiden ICA saat ini Roberto Barberini menyatakan koperasi harus hidup dalam suasana untuk mendapatkan perlakuan yang sama “equal treatment” sehingga apa yang dapat dikerjakan oleh perusahaan lain juga harus terbuka bagi koperasi (ICA, 2002). Koperasi kuat karena menganut “established for last”.

Pada tahun 1995 gerakan koperasi menyelenggarakan Kongres koperasi di Manchester Inggris dan melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan International Cooperative Identity Statement (ICIS) yang menjadi dasar tentang pengertian prinsip dan nilai dasar koperasi untuk menjawab tantangan globalisasi. Patut dicatat satu hal bahwa kerisauan tentang globalisasi dan liberalisasi perdagangan di berbagai negara terjawab oleh gerakan koperasi dengan kembali pada jati diri, namun pengertian koperasi sebagai “enterprise” dicantumkan secara eksplisit. Dengan demikian mengakhiri perdebatan apakah koperasi lembaga bisnis atau lembaga “quasi-sosial”. Dan sejak itu semangat untuk mengembangkan koperasi terus menggelora di berbagai sistim ekonomi yang semula tertutup kini terbuka.

Catatan awal : “Dari sini dapat ditarik catatan bahwa koperasi berkembang dengan keterbukaan, sehingga liberalisasi perdagangan bukan musuh koperasi”.

Di kawasan Asia Pasifik hal serupa ini juga terjadi sehingga pada tahun 1990 diadakan Konferensi Pertama Para Menteri-Menteri yang bertanggung jawab dibidang koperasi di Sydney, Australia. Pertemuan ini adalah kejadian kali pertama untuk menjembatani aspirasi gerakan koperasi yang dimotori oleh ICA-Regional Office of The Asian dan Pacific dengan pemerintah. Pertemuan ini telah melicinkan jalan bagi komunikasi dua arah dan menjadi pertemuan regional yang reguler setelah Konferensi ke II di Jakarta pada tahun 1992. Pesan Jakarta yang terpenting adalah hubungan pemerintah dan gerakan koperasi terjadi karena kesamaan tujuan antara negara dan gerakan koperasi, namun harus diingat program bersama tidak harus mematikan inisiatif dan kemurnian koperasi. Pesan kedua adalah kerjasama antara koperasi dan swasta (secara khusus disebut penjualan saham kepada koperasi) boleh dilakukan sepanjang tidak menimbulkan erosi pada prinsip dan nilai dasar koperasi.

Pengalaman Koperasi Di Indonesia

Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi “regulatory” dan “development” secara sekaligus (Shankar 2002). Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.

Selama ini “koperasi” di-kem-bangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar ba-gi penduduk Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian didukung dengan program pem-bangunan untuk membangun KUD. Disisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras seperti yang se-lama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pem-bangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Sehingga nasib koperasi harus memikul beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media masa. Dalam pandangan pengamatan internasional Indonesia mengikuti lazimnya pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti disektor pertanian (Sharma, 1992).

Pengalaman Umum Kemajuan Koperasi : Mencari Determinan

Sejarah kelahiran koperasi di dunia yang melahirkan model-model keberhasilan umumnya berangkat dari tiga kutub besar, yaitu konsumen seperti di Inggris, kredit seperti yang terjadi di Perancis dan Belanda kemudian produsen yang berkembang pesat di daratan Amerika maupun di Eropa juga cukup maju. Namun ketika koperasi-koperasi tersebut akhirnya mencapai kemajuan dapat dijelaskan bahwa pendapatan anggota yang digambarkan oleh masyarakat pada umumnya telah melewati garis kemiskinan. Contoh pada saat Revolusi Industri pendapatan/anggota di Inggris sudah berada pada sekitar US\$ 500,- atau di Denmark pada saat revolusi pendidikan dimulai pendapatan per kapita di Denmark berada pada kisaran US\$ 350,-. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan belanja rumah tangga baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen mampu menunjang kelayakan bisnis perusahaan koperasi. Pada akhirnya penjumlahan keseluruhan transaksi para anggota harus menghasilkan suatu volume penjualan yang mampu mendapatkan penerimaan koperasi yang layak dimana hal ini ditentukan oleh rata-rata tingkat Pendapatan atau skala kegiatan ekonomi anggota.

Syarat 1 : “Skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi”.

Didaratan Eropa koperasi tumbuh melalui koperasi kredit dan koperasi konsumen yang kuat hingga disegani oleh berbagai kekuatan. Bahkan 2 (dua) bank terbesar di Eropa milik koperasi yakni “Credit Agricole” di Perancis, RABO-Bank di Netherlands Nurinchukin bank di Jepang dan lain-lain. Disamping itu hampir di setiap negara menunjukkan adanya koperasi kredit yang kuat seperti Credit Union di Amerika Utara dan lain-lain. Kredit sebagai kebutuhan universal bagi umat manusia terlepas dari kedudukannya sebagai produsen maupun konsumen dan penerima penghasilan tetap atau bukan adalah “potensial customer-member” dari koperasi kredit.

Syarat 2 : “Harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan-pinjam) dapat menjadi platform dasar menumbuhkan koperasi”.

Di manapun baik di negara berkembang maupun di negara maju kita selalu disuguhkan contoh koperasi yang berhasil, namun ada kesamaan universal yaitu koperasi peternak sapi perah dan koperasi produsen susu, selalu menjadi contoh sukses dimana-mana. Secara spesial terdapat contoh yang lain seperti produsen gandum di daratan Australia, produsen kedele di Amerika Utara dan Selatan hingga petani tebu di India yang menyamai kartel produsen. Keberhasilan universal koperasi produsen susu, baik besar maupun kecil, di negara maju dan berkembang nampaknya terletak pada keserasian struktur pasar dengan kehadiran koperasi, dengan demikian koperasi terbukti merupakan kerjasama pasar yang tangguh untuk menghadapi ketidakadilan pasar. Corak ketergantungan yang tinggi kegiatan produksi yang teratur dan kontinyu menjadikan hubungan antara anggota dan koperasi sangat kukuh.

Syarat 3 : “Posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema bilateral monopoli menjadi akar memperkuat posisi tawar koperasi”.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, transparansi struktural tidak berjalan seperti yang dialami oleh negara industri di Barat, upah buruh di pedesaan secara riil telah naik ketika pengangguran meluas sehingga terjadi Lompatan ke sektor jasa terutama sektor usaha mikro dan informal (Oshima, 1982). Oleh karena itu kita memiliki kelompok penyedia jasa terutama disektor perdagangan seperti warung dan pedagang pasar yang jumlahnya mencapai lebih dari 6 juta unit dan setiap hari memerlukan barang dagangan. Potensi sektor ini cukup besar, tetapi belum ada

referensi dari pengalaman dunia. Koperasi yang berhasil di bidang ritel di dunia adalah sistem pengadaan dan distribusi barang terutama di negara-negara berkembang “user” atau anggotanya adalah para pedagang kecil sehingga model ini harus dikembangkan sendiri oleh negara berkembang.

Syarat 4 : “Pendidikan dan peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan koperasi (pengembangan SDM)”.

Koperasi selain sebagai organisasi ekonomi juga merupakan organisasi pendidikan dan pada awalnya koperasi maju ditopang oleh tingkat pendidikan anggota yang memudahkan lahirnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam sistem demokrasi dan tumbuhnya kontrol sosial yang menjadi syarat berlangsungnya pengawasan oleh anggota koperasi. Oleh karena itu kemajuan koperasi juga didasari oleh tingkat perkembangan pendidikan dari masyarakat dimana diperlukan koperasi. Pada saat ini masalah pendidikan bukan lagi hambatan karena rata-rata pendidikan penduduk dimana telah meningkat. Bahkan teknologi informasi telah turut mendidik masyarakat, meskipun juga ada dampak negatifnya.